

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 - 2026

Jumat, 21 November 2025

ACARA :

**PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN
PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :
“ PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 ”.

H a r i : Jumat

Tanggal : 21 November 2025

Waktu : Pukul 08.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Ponorogo

Jenis Rapat : Rapat Paripurna

Sifat rapat : Terbuka untuk umum

Acara : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara:
“ Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 ”.

Pimpinan rapat : Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)

Sekretaris : Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 6 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 3 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 5 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 6 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 2 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 4 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 3 Orang;

Jumlah : 24 Orang

Yaitu :

1. Tri Suryati, A.Md.
2. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
3. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
4. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
5. Evi Dwitasari, S.Sos.
6. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP
7. Siswandi
8. H. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
9. Mukridon Romdloni, S.T.
10. Sukirno
11. Agus Subiyantoro
12. Pamuji, S.Pd.
13. Agus Mustifa Latief H.
14. Isnani, S.Pd.
15. Eka Rekno Setyani, S.H.
16. Anik Suharto, S.Sos.
17. Agus Suwito
18. Elvis Wibisono
19. Widodo, S.H.
20. Yuliana
21. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
22. Christine Hery Purnawaty, S.E.
23. Abu Kohar
24. Ribut Riyanto, S.H.

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

- | | |
|--|------------|
| 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 5 Orang; |
| 2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN | : 5 Orang; |
| 3. Fraksi Partai NasDem | : 1 Orang; |
| 4. Fraksi Partai GERINDRA | : 4 Orang; |
| 5. Fraksi Partai Demokrat | : 1 Orang; |
| 6. Fraksi Partai Golongan Karya | : 4 Orang; |
| 7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera | : 1 Orang; |

Jumlah : 21 Orang

Yaitu :

1. Suhari, S.H.
2. Fikso Rubianto
3. Mahfut Arifin, S.Sos.
4. Mashudi

5. Mujiatin
6. Teguh Pujiyanto
7. Sunyoto, S.Pd.
8. Riyanto, S.IP.
9. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
10. dr. Burhanudin
11. Sunarto, S.Pd.
12. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
13. Drs. Mulyono
14. Ghuftron Ridlo'i
15. Imam Mustofa
16. Binti Rahmawati, S.Pd.
17. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
18. Ayatulloh Ali Syari'ati, S.H.
19. Kateni, S.H.
20. Muryanto, S.IP.
21. Udin Irchamna

Eksekutif yang hadir :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Hj. Lisdyarita, S.H. | : Plt. Bupati Kabupaten Ponorogo; |
| 2. Agus Sugiharto | : Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo |
| 3. Bambang S. | : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; |
| 4. Harjono | : Asisten Administrasi Perekonomian dan PembangunanSekretariat Daerah kabupaten Ponorogo; |
| 5. Dewi W.H. | : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo; |
| 6. Seni | : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo; |
| 7. Lilik | : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Ponorogo; |
| 8. Sri B. Y. | : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo; |
| 9. Luhur A. | : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo; |
| 10. Suko Widodo | : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo; |
| 11. Bambang | : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo; |
| 12. Bambang Windu | : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo; |
| 13. Tri Susilo | : Inspektorat Kabupaten Ponorogo; |
| 14. Hera Zuana | : Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo; |

15. Mietha F. P. : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
16. Budiono : RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo
17. Enggar : RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
18. Anik Y : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo;
20. Shanti : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
21. Tony S. : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo;
22. Etik M. : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
23. Harminto : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
24. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;
25. Alim N. F. : Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
26. Jamus : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;
27. Imron R. : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
28. Endah Winduri : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
29. Jamus : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo;
30. Zainal : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo;
31. Sugeng Prakoso : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
32. Citra : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
33. Retnani : Kecamatan Ponorogo;
34. Siti Hanifah : Kecamatan Babadan;
35. Gustiasari : Kecamatan Kauman;
36. A. Prasojo : Kecamatan Sampung;
37. Moh. Zainal Arifin : Kecamatan Sukorejo;
38. Sigit P. : Kecamatan Badegan;
39. Mariadi : Kecamatan Siman;
40. Arifin A. : Kecamatan Jenangan;
41. Tiena S. : Kecamatan Ngebel;
42. Agus Hermansyah : Kecamatan Sooko;
43. Suwadi : Kecamatan Pudak;
44. Chendy A. W : Kecamatan Sawoo;
45. Yusub D. : Kecamatan Jetis;
46. Ari H. : Kecamatan Balong;
47. Totok Y. : Kecamatan Pulung;

- 48. Manda : Kecamatan Mlarak;
- 49. Suratman : Kecamatan Ngrayun;
- 50. Taryono : Kecamatan Slahung;
- 51. Lisis : Kecamatan Bungkal;
- 52. Ika Niscahyani : Kecamatan Jambon.

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat siang, salam Sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Plt. Bupati Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.;

Yang Kami hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;

Yang Kami hormati pula Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo beserta jajaran;

Hadirin undangan yang berbahagia.

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA TIGA STANZA.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....MENGHENINGKAN CIPTA.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

“ PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 ”.

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Jumat, tanggal 21 November 2025 :

Jumlah Anggota DPRD 45 orang

Hadir 24 orang

Tidak Hadir 21 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Jumlah 8 orang

Hadir 3 orang

Tidak hadir 5 orang, dengan keterangan sbb:

- | | |
|--------------------------|------|
| 1. Suhari, S.H. | IJIN |
| 2. Fikso Rubianto | IJIN |
| 3. Mahfut Arifin, S.Sos. | IJIN |
| 4. Mashudi | IJIN |
| 5. Mujiatin | IJIN |

2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN

: Jumlah 10 orang

Hadir 5 orang

Tidak hadir 5 orang, dengan keterangan sbb :

- | | |
|-----------------------|------|
| 1. Teguh Pujianto | IJIN |
| 2. Sunyoto, S.Pd. | IJIN |
| 3. Riyanto, S.IP. | IJIN |
| 4. H. Wahyudi Purnomo | IJIN |
| 5. dr. Burhanudin | IJIN |

3. Fraksi Partai Nasdem

: Jumlah 7 orang

Hadir 6 orang

Tidak Hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :

- | | |
|-------------------|------|
| 1. Sunarto, S.Pd. | IJIN |
|-------------------|------|

4. Fraksi Partai GERINDRA

: Jumlah 6 orang

Hadir 2 orang

Tidak hadir 4 orang, dengan keterangan sbb :

- | | |
|--------------------------------------|------|
| 1. Reyfal bayu Adji Prambodho, S.IP. | IJIN |
| 2. Drs. Mulyono | IJIN |
| 3. Gufron Ridlo'i | IJIN |
| 4. Imam Mustofa | IJIN |

5. Fraksi Partai Demokrat

: Jumlah 5 orang

Hadir 4 orang

Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :

- | | |
|---------------------------|------|
| 1. Binti Rahmawati, S.Pd. | IJIN |
|---------------------------|------|

6. Fraksi Partai Golongan Karya

: Jumlah 5 orang

Hadir 1 orang

Tidak hadir 4 orang, dengan keterangan sbb :

7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
 Hadir 3 orang
 Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Udin Irchamna IJIN

Sholawat serta Salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita mendapat Syafaatnya di Yaumul Qiamah nanti, Aamiin.

Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, bahwa berdasarkan:

1. Berdasarkan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam suatu Peraturan Daerah.;
2. Surat Bupati Ponorogo Nomor : **900.1/ KH / 2956 / 405.24 / 2025**. Tertanggal 12 September 2025 Tentang Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Serta sesuai dengan perubahan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan November Tahun 2025, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah

“ PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 ”.

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (satu) huruf (c), maka rapat telah memenuhi *kuorum*.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH...**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

XXX (KETUK PALU 3 X) rapat dimulai pukul 10.40 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Memasuki acara inti rapat paripurna hari ini, kita akan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026. Agenda ini merupakan salah satu tahapan penting yang harus dilalui dalam rangkaian pembahasan penyusunan anggaran daerah guna memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel.

Pandangan umum dari masing-masing Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Melalui pandangan ini, setiap Fraksi memiliki kesempatan untuk menyampaikan penilaian, catatan strategis, serta masukan yang komprehensif terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, proses perumusan kebijakan anggaran dapat berlangsung secara transparan, partisipatif, dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengawali rangkaian penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, kami persilakan kepada:

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, untuk menyampaikan Pandangan Umumnya. *Dipersilakan.*

(SETELAH JURU BICARA SELESAI MENYAMPAIKAN)

Terimakasih disampaikan kepada Saudari Tri Suryati, A.Md. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Hadirin kita lanjut, untuk berikutnya kami persilahkan dari juru bicara Fraksi:

2. Fraksi Partai Gerindra, dipersilahkan;

(SETELAH JURU BICARA SELESAI MENYAMPAIKAN)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Eka Rekno Setyani, S.H. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

3. Fraksi PDI Perjuangan maPAN, dipersilahkan;

(SETELAH JURU BICARA SELESAI MENYAMPAIKAN)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara H. Agung Priyanto, S.E., M.M. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

4. Fraksi Partai NasDem, dipersilahkan;

(SETELAH JURU BICARA SELESAI MENYAMPAIKAN)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Agus Subiyantoro yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

5. Fraksi Partai Demokrat, dipersilahkan;

(SETELAH JURU BICARA SELESAI MENYAMPAIKAN)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Yuliana yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

6. Fraksi Partai Golkar, dipersilahkan

(SETELAH JURU BICARA SELESAI MENYAMPAIKAN)

Disampaikan terima kasih kepada Eko Priyo Utomo, S.T., M.E. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera, dipersilahkan;

(SETELAH JURU BICARA SELESAI MENYAMPAIKAN)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Ribut Riyanto, S.H. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

(Lampiran I)

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Demikianlah rangkaian penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah kita dengarkan bersama. Seluruh pandangan, catatan strategis, dan masukan yang disampaikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembahasan kebijakan anggaran daerah yang dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Fraksi atas pandangan serta saran konstruktif yang diberikan demi penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Pandangan tersebut tidak hanya mencerminkan sikap politik dan perhatian terhadap dinamika pembangunan daerah, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab DPRD dalam memastikan bahwa kebijakan anggaran yang dirumuskan berpihak kepada kepentingan masyarakat dan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya, perkenalkan kami menyampaikan pemberitahuan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo berikutnya akan dilaksanakan pada **hari Senin, tanggal 24 November 2025**. Rapat tersebut akan mengagendakan pembahasan sejumlah materi penting terkait fungsi legislasi dan penganggaran DPRD Kabupaten Ponorogo. Adapun agenda Rapat Paripurna dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN KEDUA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025;**
- 2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026;**
- 3. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026;**
- 4. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026.**

PENUTUP

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikianlah seluruh rangkaian Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dapat kita selesaikan dengan baik dan tertib. Atas nama Pimpinan DPRD, kami menyampaikan terima kasih kepada Sdri. Plt. Bupati Ponorogo beserta jajaran Pemerintah Daerah, seluruh Anggota DPRD, serta para hadirin yang telah mengikuti jalannya rapat dengan penuh perhatian.

Pandangan dan masukan yang telah disampaikan Fraksi-Fraksi pada hari ini akan menjadi dasar penting dalam pembahasan lanjutan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, sehingga proses penyusunan anggaran dapat berjalan lebih komprehensif, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pimpinan rapat, kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga upaya kita bersama dalam menjalankan tugas konstitusional ini senantiasa mendapat kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, marilah kita tutup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dengan **BIQAULI TAHMID, HAMDALLAH...**

ALHAMDULILLAH RABBIL 'ALAMIN.

XXX (KETUK PALU 3 X) rapat ditutup pada pukul 11.24 WIB

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“ PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 ”.

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

Ponorogo, 21 November 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Drs. JOKO WASKITO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 - 2026

Jumat, 21 November 2025

**PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2026**

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2025 - 2026**

Jumat, 21 November 2025

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA**



PANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten
Ponorogo Tanggal 21 November 2025

Assalaamu'alaikumWarahmatullahiWabarakaatuh.

Yth. Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo;

Yth. Sdr. Bupati beserta jajarannya;

Yth. Anggota DPRD KabupatenPonorogo;

Yth. Forkopimda Kabupaten Ponorogo; dan

Yth. Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga pribadi dan perjuangannya menjadikan inspirasi bagi kita.

Saudara Pimpinan, Saudara Bupati dan Hadirin Sidang Paripurna

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2026 merupakan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur dasar, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga APBD tahun 2026 sangat penting fungsinya sebagai alat penggerak perekonomian daerah. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, belanja daerah mampu memberikan efek multiplier terhadap berbagai sektor, terutama sektor infra struktur jalan yang memadahi, sector pertanian, industri kecil-menengah, pariwisata, serta pendidikan dan kesehatan. APBD diharapkan menjadi motor pemulihan dan penguatan daya tahan ekonomi local yang mengarah pada peningkatan produktivitas masyarakat serta pemerataan hasil pembangunan di wilayah perkotaan maupun pinggiran pedesaan.

Fraksi Kebangkitan Bangsa memandang APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2026 yang mengalami efisiensi penurunan justru akan menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan,

partisipatif, dan akuntabel. Sehingga setiap alokasi anggaran akan didasarkan pada prioritas pembangunan dan capaian kinerja nyata serta memastikan APBD benar-benar berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Hadirin sidang paripurna yang berbahagia

Secara Umum, Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai dan sependapat bahwa berdasarkan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, pada prinsipnya Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi kaidah hukum dan layak untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD. Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa akan memberikan usulan/masukan dan Pertanyaan sebagaimana kami tuangkan dalam *lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pandangan Umum ini*

Demikian pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2026. Terimakasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wallahul muwafiq ilaa aqwamithoriq

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Ponorogo, 21 November 2025

PIMPINAN

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN PONOROGO**

Ketua



M U J I A T I N

Sekretaris



TRI SURYATI, A.Md

**Lampiran Pandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD
Kabupaten Ponorogo Terhadap Raperda tentang Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo tahun
2026**

1. Fraksi Kebangkitan Bangsa menyetujui terhadap beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian dalam pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, yang pada prinsipnya Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi kaidah hukum dan layak untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD.
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa mendukung sinkronisasi program-program nasional seperti Program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah rakyat.
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong Pemerintah Daerah memberikan prioritas program pemeliharaan infratraktur jalan di beberapa wilayah pinggiran yang masih belum memadai agar Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Pemerintah Daerah agar melakukan meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) serta evaluasi dan mengkaji pengeluaran rutin untuk PJU sehingga pengeluaran bisa ditekan dan lebih efisien.
5. Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti kebutuhan lahan relokasi TPA Mrican yang sudah penuh (over load) dapat segera disikapi dengan penyediaan lahan untuk relokasi TPA baru.
6. Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong Pemerintah Daerah agar dalam pelaksanaan APBD nanti selalu berpedoman pada tertib administrasi, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah Daerah

diharapkan agar lebih baik dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk melakukan inovasi dan optimalisasi dalam pengelolaan pendapatan utamanya pada Retribusi Daerah, Pengelolaan pendapatan dari Aset daerah yang produktif dan peningkatan pendapatan dari perusahaan daerah seperti PDAM dan Sari Gunung. Mendukung sepenuhnya kerjasama investasi dan permodalan dari berbagai pihak yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi dari kegiatan usaha yang berkembang, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

Ponorogo, 21 November 2025

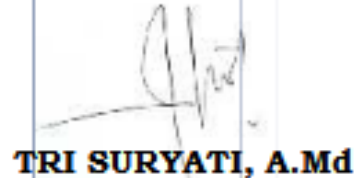
**PIMPINAN
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN PONOROGO**

Ketua



M U J I A T I N

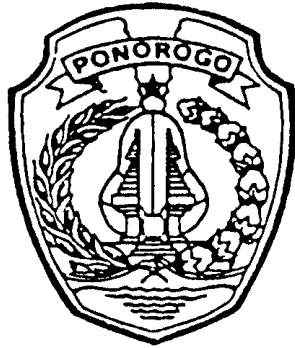
Sekretaris



TRI SURYATI, A.Md

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 - 2026

Jumat, 21 November 2025

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN

**PANDANGAN UMUM
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**



**FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO TAHUN 2025**

FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN
TERHADAP RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmattullohi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua Rahayu

M E R D E K A !!!

Yang kami hormati :

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo...

Plt. Bupati beserta segenap unsur FORKOMPIMDA Kabupaten Ponorogo... Plt.

Sekretaris Daerah dan para Kepala OPD...

Rekan-rekan Tenaga Ahli Fraksi, Insan Pers, serta hadirin undangan yang berbahagia...

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan menghadiri Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tanpa ada halangan suatu apapun.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri taulan Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang selalu kita nantikan safa'atnya di *yaumul qiyamah, allohuma amin.*

Sidang Dewan yang terhormat,

Pemulihan ekonomi (economic growth) melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif masih menjadi isu nasional dan global. Isu tersebut semakin menantang ketika saat ini dunia dihadapi oleh fenomena BANI (brittle, anxious, non-linier, and incomprehensible) yang dikemukakan oleh Jamais Cascio dan RUPT (rapid, unpredictable, paradoxical, and tangled) yang dikemukakan oleh Center for Creative Leadership. Menghadapi kedua fenomena tersebut, dibutuhkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang adaptif dan inovatif sehingga dapat memitigasi potensi negatif yang mungkin terjadi.

Melihat fenomena tersebut, Fraksi PDI Perjuangan maPAN memandang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan langkah strategis untuk menghadapi kedua fenomena tersebut. APBD tidak hanya memiliki fungsi otorisasi dan perencanaan, namun juga berfungsi sebagai instrumen distribusi sumber daya keuangan daerah supaya tercipta kesejahteraan masyarakat dan sebagai instrumen stabilisasi perekonomian dan pembangunan daerah. Ditengah kondisi fiskal yang kurang memadai dan banyaknya efisiensi anggaran maka penyusunan APBD Tahun 2026 harus dilaksanakan berbasis pada prinsip good financial governance yakni transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien.

Sidang Dewan yang terhormat,

Fraksi PDI Perjuangan maPAN berpendapat bahwa Raperda tentang APBD Tahun Anggaran layak untuk dibahas ke dalam tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, setelah melakukan pengkajian, pencermatan, analisis, dan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten Ponorogo tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi PDI Perjuangan maPAN memberikan beberapa hal saran, masukan, dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah harus memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Maka dari itu Fraksi PDI Perjuangan maPAN mendorong adanya inovasi dan pengawasan dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar PAD dapat meningkat dan mencapai target.

2. Ditengah adanya efesiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, Fraksi PDI Perjuangan maPAN mendorong Pemerintah Daerah untuk tetap komitmen memperhatikan pembangunan infrastruktur terus dijaga agar kesejahteraan masyarakat Ponorogo semakin meningkat khususnya pembangunan jalan dan kantor pelayanan publik, diantaranya:
 - a. Ruas Jalan Tumpak pelem Semanding, Sawoo.
 - b. Ruas Jalan Sekelip, Danyang.
 - c. Ruas jalan Perniagaan Kel. Patihan Wetan.
 - d. Ruas jalan Ngunut, Danyang.
 - e. Jl. Stadion Timur gang I Kel. Kertosari .
 - f. Perbaikan Kantor Kelurahan Kadipaten.
 - g. Perbaikan Kantor Kelurahan Patihan Wetan.
3. Bagaimana rancangan APBD tahun 2026 untuk melanjutkan penanganan atau pengelolaan pabrik sampah yang ada di Desa Mrican?
4. Bagaimana tindak lanjut Pemerintah Daerah yang telah mengajukan pinjaman 100 M di bank jatim pada tahun 2025 ini ?
5. Tekait meningkatnya frekuensi bencana di Kabupaten Ponorogo ditahun 2025, antisipasi apa yang dilakukan Pemerintah Daerah? Mohon di sampaikan Kajian Resiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontinjensi (REKON)?

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan maPAN terhadap Raperda Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Terimakasih atas perhatian serta mohon maaf apabila ada hal hal yang kurang berkenan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk mewujudkan Ponorogo Hebat. Aamiin YRA

Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua,
Rahayu...

Ponorogo, 21 november 2025

**FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**

Ketua

Sekretaris,

Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP

Siswandi

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2025 - 2026**

Jumat, 21 November 2025

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM**



PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

TERKAIT

**RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2026**

PONOROGO, 20 NOVEMBER 2025

Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
Terhadap Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Salam Restorasi Indonesia !!!!

- Yth. Ibu Hj. Lisdyarita, S.H (Plt.) Bupati Ponorogo
- Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah dan Para Staf Ahli Bupati
- Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
- Yth. Rekan – rekan pers serta hadirin undangan yang berbahagia

Mengawali Pandangan umum fraksi ini marilah bersama – sama kita panjatkan Puji dan syukur kepada ALLAH SWT. yang telah memberikan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini masih dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo tanpa ada halangan suatu apapun.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang seperti yang kita alami sekarang ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun 2026 yang telah mempertimbangkan berbagai aspek kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Akan tetapi, situasi saat ini menambah beratnya beban kerja dan tanggung

jawab kita sebagai lembaga legislatif dalam memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, terlebih di tengah isu hukum yang melibatkan pemimpin daerah kita.

Kami menyadari bahwa dan situasi ini menuntut kita semua untuk tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi pengawasan, serta mendukung proses penegakan hukum demi terciptanya pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, kami berharap seluruh rangkaian pembahasan APBD ini mampu menjadi momentum untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi anggaran, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat tetap terjaga.

Setelah mencermati isi Pengantar Nota Keuangan Nomor : 900.1 / KH/ 2956 / 405.24/2025 tertanggal 12 September 2025 tentang Usul Persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan eksekutif, bersama ini Fraksi NasDem memberikan Kritik, masukan, pendapat dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana langkah pemerintah daerah dalam memastikan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan utama masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur? **(Mohon Penjelasan)**
2. Apa saja indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam Raperda APBD Tahun anggaran 2026 ? **(Mohon dijelaskan)**
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pengelolaan anggaran selama pelaksanaan APBD 2026? **(Mohon Penjelasan)**
4. Bagaimana pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan tahun 2025, terutama yang tidak mencapai target, sebagai dasar penyempurnaan alokasi APBD tahun 2026? **(Mohon Penjelasan)**

5. Sejauh mana pemerintah menyiapkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, tanpa menambah beban ekonomi masyarakat? **(Mohon Penjelasan)**
6. Berapa besar alokasi anggaran yang disiapkan dalam APBD 2026 untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan, dan bagaimana perbandingannya dengan APBD 2025 ? **(Mohon dijelaskan)**
7. Berapa total panjang jalan kabupaten yang saat ini masuk kategori rusak ringan dan rusak berat, serta bagaimana penyebarannya di tiap kecamatan?

-Rekomendasi

Fraksi NasDem Merekomendasikan :

1. Fraksi NasDem menyarankan agar Pemerintah Daerah menempatkan pelayanan dasar masyarakat sebagai prioritas utama dalam APBD Tahun anggaran 2026, terutama pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan warga harus dipastikan mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran.
2. Dalam bidang kesehatan, Fraksi NasDem menekankan pentingnya memperkuat alokasi pembiayaan untuk layanan BPJS Kesehatan, baik untuk memastikan kelancaran pembayaran iuran bagi masyarakat kurang mampu maupun menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas.
3. Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah-langkah taktis dan strategis dalam menghadapi musim penghujan. Selain mitigasi bencana alam, juga infrastruktur jalan yang saat ini sudah banyak yang rusak.
4. Sebaiknya dilakukan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal agar pengelolaan anggaran lebih transparan dan akuntabel. Serta Perlu dilakukan asesmen kebutuhan prioritas masyarakat yang berbasis data

dan berbasis hasil (*outcome-based budgeting*) agar anggaran lebih efektif.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Fraksi NasDem memandang bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah, menguatkan stabilitas ekonomi masyarakat, serta memastikan pemerataan hasil pembangunan.

Pada akhir Pandangan Umum ini fraksi NasDem sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 ke tingkat pembahasan lanjutan, dengan terus perkuat sinergi dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo terhadap rancangan peraturan daerah Ponorogo ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thariq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo , 20 November 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo

Fraksi Partai NasDem

Plt. Ketua,

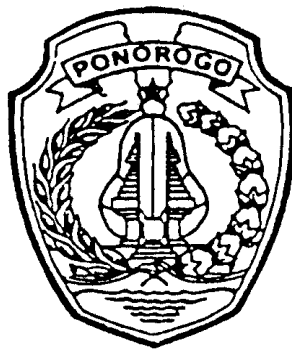
Sekretaris,

AGUS SUBIANTORO

MUKRIDON ROMDLONI, S.T

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 - 2026

Jumat, 21 November 2025

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GERINDRA

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO



TERHADAP
Nota Keuangan rancangan peraturan Daerah tentang
ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN
PONOROGO TA-2026

PONOROGO, 21 November 2025

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
Terhadap Nota Keuangan rancangan peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun Anggaran 2026

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Salam

Indonesia Raya !!!!

- Yth. Bpk. H.Sugiri Sancoko, S.E, M.M. Bupati Ponorogo
- Yth. Ibu Hj Lisdyarita, S.H Wakil Bupati Ponorogo
- Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah dan Para Staf Ahli Bupati
- Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
- Yth. Rekan – rekan pers serta hadirin undangan yang berbahagia

Mengawali Pandangan umum fraksi ini marilah bersama – sama kita panjatkan Puji dan syukur kepada ALLAH SWT. yang telah memberikan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini masih dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo tanpa ada halangan suatu apapun.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang seperti yang kita alami sekarang ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Berikut ini beberapa Pandangan umum Fraksi Partai Gerindra Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo : **Mengenai Nota Keuangan rancangan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Ponorogo**

Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh PemKab ponorogo yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Setelah mempelajari isi Pengantar Nota Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan eksekutif, kami Fraksi Gerindra memberikan beberapa tanggapan dan pertanyaan sebagai berikut :

A. Kami Fraksi Gerindra Menanyakan terkait anggaran terhadap ;

1. Pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp. 3.263.236.800,00 meliputi apa saja? Tolong jelaskan!
2. Berapakah anggaran untuk pendidikan formal dan non formal tahun 2026? Mohon rinciannya!
3. Berapakah anggaran infrastruktur 2026?
4. Kami berpendapat menyediakan/menambah anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur jalan. Contohnya: jeruksing menuju jetis dan jeruksing menuju pulung.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

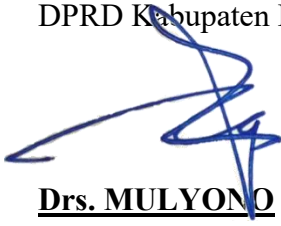
Pada akhir Pandangan Umum ini fraksi Gerindra kami berharap pengelolaan dana APBD TA. 2026 digunakan dengan sebaik-baiknya dan kami sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 ke tingkat pembahasan lanjutan, dengan terus perkuat sinergi dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo terhadap rancangan peraturan daerah Ponorogo ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Ponorogo , 21 November 2025

Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
DPRD Kabupaten Ponorogo



Drs. Mulyono

KETUA



REYFAL BAYU ADJI PRAMBODHO

SEKRETARIS

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2025 - 2026**

Jumat, 21 November 2025

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**



PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

TERKAIT

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2026**



**DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
JUM'AT, 21 NOVEMBER 2025**



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2026**

Assalamu' alaikum Wr. Wb

Yang kami hormati Sdri. Plt.Bupati Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita,SH.

Yang kami hormati ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo

Yang kami hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Fokompida) Kabupaten Ponorogo

Yang kami hormati Sdr.Plh. Sekda Kabupaten Ponorogo

Yang kami hormati, Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor Instansi, Camat, serta Hadirin Undangan yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah SWT, berkat nikmat-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna kali ini dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiyyullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut setiaNya hingga akhir zaman.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan dan draf Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026, kami Fraksi Partai Demokrat DPRD Ponorogo memberikan saran, pertanyaan, maupun pendapat sebagai berikut:

1. Postur RAPBD Tahun Anggaran 2026 ini sangat minimalis, karena adanya pengurangan TKD. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dan inovatif dalam mengelola keuangan daerah. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah agar tetap seimbang dan tidak mengorbankan program-program prioritas akibat pengurangan TKD ini? *Mohon Dijelaskan!*
2. Dengan adanya pengurangan TKD kami Fraksi Partai Demokrat mendorong kepada pemerintah daerah lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal ini penting agar kemandirian kemampuan fiskal di tahun yang akan datang semakin kuat.
3. Berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah. Perlu kami tanyakan berapa rupiah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Alat Berat dan Mineral (MBLM) yang diterima pemerintah daerah dari provinsi tahun 2025 ini? *Mohon dijelaskan!*
4. Berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yaitu aset (bengkok), apakah sampai dengan saat ini sudah dilakukan *appraisal* kembali sesuai undang-undang yang berlaku terkait nilai sewa aset? *Mohon Dijelaskan!*
Appraisal ini menurut kami sangat penting, karena nilai sewa biasanya setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan adanya hasil kajian dari tim *appraisal* diharapkan nilai sewa aset akan lebih meningkat. Dimana muaranya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita.
5. Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Perusahaan Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta Katong. Kami mencermati di tiap tahun selalu mengalami peningkatan deviden. Kinerja yang harus diapresiasi dan

terus ditingkatkan. Untuk itu kami mendorong agar PUDAM Tirta Katong selalu berinovasi sehingga kebutuhan pelanggan bisa terlayani dengan baik. Harapannya dengan begitu kesadaran pelanggan untuk tertib membayar tagihan semakin meningkat dan menambah daya tarik pelanggan baru untuk berlangganan.

6. Terkait tidak terealisasinya hutang 100 Milyar dari Bank Jatim, kami mendorong efisiensi belanja daerah di semua OPD, agar anggaran belanjanya bisa ditambahkan untuk belanja modal jalan, jaringan, jembatan, dan irigasi. Selain itu kami juga memohon kepada pemerintah daerah kiranya anggaran perawatan rutin jalan ditambahkan. Hal ini menurut kami sangat penting karena kondisi jalan masih jauh dari harapan masyarakat.
7. Belanja daerah pos anggaran belanja tak terduga, kami mendorong anggarannya ditambah karena sebagaimana kita ketahui saat ini kondisi cuaca penuh ketidakpastian dan cenderung cuaca ekstrem.

Hadirin yang berbahagia,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Ponorogo terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026, untuk selanjutnya apabila dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekian

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Ponorogo, 21 November 2025
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

Ketua

Sekretaris


W. DODO, SH.

AGUS SUWITO

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 - 2026

Jumat, 21 November 2025

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA



PANDANGAN UMUM FRAKSI

PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

TERHADAP

USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PONOROGO TENTANG :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

PONOROGO, 21 NOVEMBER 2025



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
FRAKSI PARTAI GOLKAR
Jln. Aloon-aloon Timur No. 29 Telp (0352) 483864, Fax (0352) 483262
PONOROGO 63413

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

- Yth. Plt. Bupati Ponorogo, Ibu Hj. Lisdyarita,S.H / yang mewakili, Sekretaris Daerah, beserta jajaran Eksekutif Kabupaten Ponorogo ;
- Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo ; Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo
- Yth. Bapak/ibu Camat, Sekretaris Dewan, dan rekan-rekan Tenaga Ahli Fraksi, Wartawan serta seluruh undangan Rapat Paripurna yang berbahagia.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, karunia dan perlindungan-nya yang kepada kita semua saat ini sehingga kita dapat menghadiri acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya kelak, aamiin. Dalam kesempatan ini, izinkan kami dari Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pandangan Umum pada hari ini, berdasarkan penyampaian Plt Bupati Ponorogo pada Rapat Paripurna yang lalu tentang **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**, kami dari Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi atas penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 oleh Plt Bupati Ponorogo. Adapun secara umum Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Secara umum kami dari Fraksi Partai Golkar mendukung proses penyusunan anggaran yang transparan, partisipatif, efisien dan tepat sasaran untuk memastikan APBD yang dihasilkan

memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang maju serta berkelanjutan. Tahun 2026 harus menjadi momentum untuk akselerasi pembangunan infrastruktur pelayanan publik dan peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam rangka mencapai target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

- Fraksi Partai Golkar menyoroti bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dinilai belum optimal dan menunjukkan ketergantungan daerah yang tinggi terhadap Dana Transfer Pusat.
- Fraksi Partai Golkar meminta agar alokasi anggaran untuk program intervensi spesifik dan sensitif penurunan stunting ditingkatkan dan ditandai (tagging) secara jelas. Program Bantuan Sosial harus dipastikan tepat sasaran dan terintegrasi dengan data kemiskinan terbaru.
- Kami meminta adanya pemerataan infrastruktur, terutama jalan penghubung anta desa atau kecamatan, dan infrastruktur pertanian yang dapat mendorong roda perekonomian.
- Fraksi Partai Golkar mendukung alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan, namun kami meminta fokus pada peningkatan kualitas guru honorer dan penambahan tenaga medis di Puskesmas, bukan hanya pembangunan fisik.
- Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar besaran SiLPA tahun sebelumnya tidak dijadikan solusi permanen atas kelemahan perencanaan dan rendahnya serapan anggaran. SiLPA harus dialokasikan kembali untuk program produktif yang tertunda.
- Fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menyetujui RAPBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan, dengan harapan semua catatan kritis dan usulan strategis ini dapat diakomodasikan dan dijawab secara memuaskan oleh Kepala Daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ponorogo Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**. Terima kasih atas segala perhatian hadirin sekalian dalam mengikuti penyampaian kami, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang secara tidak kami sadari dalam penyampaian ini telah melanggar norma dan etika yang berakibat terhadap perasaan hadirin sekalian.

Billahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi kita Semua.

Ponorogo, 21 November 2025

Mengetahui

EKO PRIYO UTOMO, S.T, M.E
Ketua Fraksi Partai Golkar

AYATULLOH ALI SYARI'ATI, S.H
Sekretaris Fraksi Partai Golkar

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 - 2026

Jumat, 21 November 2025

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PEMBANGUNAN KEADILAN

SEJAHTERA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
FRAKSI PEMBANGUNAN KEADILAN SEJAHTERA**
Jl. Alon-alon Timur no.29 Ponorogo

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PEMBANGUNAN KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN
ANGGARAN 2026**

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb,*

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang terhormat Sdr. Plt. Bupati Kabupaten Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita, SH.

Yang terhormat Sdr. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo

Yang terhormat Sdr. Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo

Yang terhormat Sdr. Kepala Dinas, Camat dan hadirin undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua dan yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti.

Rapat Dewan, Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati

Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026. Penyusunan APBD tahun ini menghadapi kondisi fiskal yang menantang karena adanya penurunan pendapatan transfer sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen resmi, termasuk pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD.

Dalam perspektif FPKS, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi instrumen pembangunan yang harus memastikan keadilan, efisiensi, dan keberpihakan kepada masyarakat luas—khususnya kelompok rentan dan layanan publik dasar.

FPKS mencermati bahwa total pendapatan daerah dalam Raperda APBD 2026 mengalami penyesuaian dari **Rp2,50 triliun** menjadi **Rp2,239 triliun**, terutama akibat penurunan pendapatan transfer dari pusat. Kondisi ini menuntut strategi yang lebih progresif dalam:

1. **Menguatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**—terutama sektor pajak dan retribusi yang komposisinya masih bisa dioptimalkan melalui digitalisasi, peningkatan kepatuhan, serta penyederhanaan layanan.
2. **Diversifikasi sumber PAD** melalui inovasi sektor-sektor yang berpotensi namun belum tergarap maksimal.
3. **Peningkatan kualitas data** untuk memastikan perencanaan pendapatan lebih akurat dan terukur.

FPKS mendukung langkah Pemerintah Daerah untuk terus mengembangkan sistem pengelolaan PAD yang modern, transparan, dan berbasis teknologi.

Rapat Dewan, Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati

Sejalan dengan tantangan fiskal tersebut, F-PKS menilai bahwa diperlukan langkah-langkah penguatan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Ponorogo. Penurunan dana transfer pusat harus menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi yang selama ini belum diberdayakan secara maksimal. F-PKS memiliki beberapa catatan strategis sebagai berikut:

1. Memaksimalkan potensi wisata, baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata kuliner dengan kemudahan akses, fasilitas penunjang yang memadai, menghadirkan paket wisata dengan kemasan yang bagus dan menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Suntikan modal harus diarahkan untuk mendukung target PAD daerah sebesar satu triliun, melalui strategi bisnis yang realistis dan terukur.

2. Pemanfaatan Aset-Aset Daerah yang Belum Tereksplorasi Secara Optimal seperti gedung pertemuan, bilik ATM, lahan tidur, hingga aset tanah milik pemerintah perlu dikelola secara produktif melalui pola kerja sama, skema sewa, atau model bisnis lainnya yang legal dan menguntungkan daerah.
3. Menggerakkan potensi UMKM yang berorientasi ekspor dengan menggandeng lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang memiliki akses ke pelatihan, pengembangan dan pemasaran. Fokusnya meliputi pembiayaan, pelatihan kualitas produk, perizinan, dan akses pasar internasional.
4. Fraksi mendorong program pelatihan-pelatihan berkelanjutan yang meningkatkan kualitas produk UMKM baik dari aspek produksi, standar mutu, desain kemasan, digital marketing, maupun branding agar produk Ponorogo memiliki daya saing tinggi.
5. FPKS menekankan pentingnya menghadirkan entitas bisnis baru yang sejalan dengan karakter Ponorogo sebagai **kota santri**, seperti:
 - Bank Syariah
 - Pegadaian Syariah
 - Lembaga keuangan syariah lain yang legal dan professionalSebagai pembanding, **Bank Syariah Sragen** berkembang dari asset awal 3 miliar menjadi sekitar 500 miliar dalam kurun 13 tahun hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi syariah dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan bila dikelola dengan tepat.
6. Melakukan transformasi SDM dengan meningkatkan SDM di tiap OPD sehingga menghasilkan SDM yg mampu berkompetisi dan menguasai bidang yg diembannya.
7. Menerapkan prinsip TRANSPARANSI dan GOOD GOVERNANCE disemua tingkatan diseluruh aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
8. Mengusulkan untuk pengadaan mesin excavator pada Dinas Lingkungan Hidup mengingat pentingnya untuk penanganan sampah di TPA Mrican mengingat jumlahnya sangat terbatas itupun sebagian masih sewa dan menurut kami biaya sewa cukup tinggi.
9. Kondisi jalan di Ponorogo banyak yang rusak, termasuk jalan poros antar-kabupaten dan jalan antar-desa. Kerusakan ini terjadi karena berbagai faktor, seperti minimnya perbaikan, bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, serta dampak aktivitas tambang gelap. Beberapa kerusakan sudah berlangsung lama

dan mengganggu aktivitas warga. PKS mendorong agar dilakukan perbaikan jalan terutama Pulung-Pudak yang sekarang kondisinya rusak parah.

10. Terkait Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang sudah dibagikan ke warga namun tidak bisa digunakan, mohon dicarikan terobosan agar kartu tersebut bisa dipakai masyarakat untuk berobat secara gratis.

Rapat Dewan, Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati

Dengan memperhatikan seluruh catatan di atas, Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera menyatakan menerima dan menyetujui RAPERDA APBD tahun anggaran 2026 untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

Fraksi PKS meyakini bahwa APBD 2026, apabila dijalankan dengan transparan dan berorientasi pada pelayanan publik, akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan Ponorogo yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab politik dalam mengawal arah pembangunan daerah menuju Ponorogo yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Wallaahumuwaffiq Ilaaqwaamithoriq, Fastabiqul khAirat Billaahi-Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ponorogo, Jumat, 21 November 2025

**FRAKSI PEMBANGUNAN KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

KETUA

SEKRETARIS

CHRISTINE HERY P

UDIN IRCHAMNA